

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 1 Agustus 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 1 Agustus 2019	SUMBER DAYA AIR: UU Tidak akan Rugikan Dunia Usaha	Kalangan legislator berjanji bakal mengakomodasi kepentingan dunia usaha dalam penyusunan rancangan undang-undang sumber daya air (RUU SDA). Regulasi ini dijanjikan tidak akan menutup ruang gerak sektor usaha tertentu.
2	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 1 Agustus 2019	Penyelenggara Sistem Air Minum Belum Optimal	Kalangan pengamat menilai kapasitas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha milik desa perlu ditingkatkan karena selama ini belum optimal dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.
3	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 1 Agustus 2019	Berita Foto	Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengharapkan agar pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan karena hingga akhir Juli 2019, sisa kuota FLPP di seluruh Indonesia tinggal 20.000 unit dan bisa habis pada Agustus tahun ini.
4	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 1 Agustus 2019	PEMBIAYAAN PERUMAHAN: Syarat BP2BT sederhanakan	Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyediakan beragam cara subsidi pembiayaan perumahan, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan terbaru Bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis Tabungan (BP2BT).
5	Media Indonesia (Halaman 16)	Kamis, 1 Agustus 2019	Selatan Pulau Jawa Rawan Tsunami	Empat hari lalu media sosial diramaikan adanya isu tsunami dan gempa besar yang melanda wilayah selatan Pulau Jawa. Isu itu tentu mencemaskan jika membayangkan dampak yang ditimbulkannya.
6	Media Indonesia (Halaman 5)	Kamis, 1 Agustus 2019	Kalimantan Timur Sodorkan Dua Lokasi Calon Ibu Kota	PROVINSI Kalimantan Timur menyodorkan dua lokasi sebagai calon ibu kota negara, yakni kawasan Tahura Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kelurahan Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7	Media Indonesia (Halaman 5)	Kamis, 1 Agustus 2019	Berita Foto	Daerah yang menjadi bakal calon ibu kota negara itu telah ditinjau Presiden Joko Widodo pada Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan ibu kota negara.
8	Media Indonesia (Halaman 1)	Kamis, 1 Agustus 2019	Danau Toba: Jokowi Promosi Besar-besaran	Mulai tahun depan, pemerintah akan mempromosikan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata kelas dunia secara besar-besaran. Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu di Tano Ponggol, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara, kemarin.
9	Kompas (Halaman 2)	Kamis, 1 Agustus 2019	Warga Yakin Ibu Kota Pindah ke Kalteng	Sejumlah warga Kalimantan Tengah meyakini, ibukota negara Republik Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke daerahnya.
10	Kompas (Halaman 15)	Kamis, 1 Agustus 2019	Pembangunan Kawasan Danau Toba Ditarget Selesai 2020	Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur, destinasi, sumber daya manusia, dan pemulihan lingkungan hidup di kawasan Danau Toba Sumatera Utara, hingga akhir 2020.
11	Koran Tempo (Halaman Metro)	Kamis, 1 Agustus 2019	Waduk Rambutan Jadi Proyek Percontohan Naturalisasi	Pemerintah DKI Jakarta memastikan waduk Rambutan 1 dan 2, Jakarta Timur, sebagai proyek percontohan program naturalisasi waduk di ibukota.

12	Koran Tempo (Halaman Metro)	Kamis, 1 Agustus 2019	DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Penataan Sungai	Pemerintah DKI Jakarta akan menggenjot lagi pembebasan lahan untuk penataan sejumlah sungai di Ibu kota.
----	-----------------------------------	--------------------------	---	--

Judul	<b>SUMBER DAYA AIR: UU Tidak akan Rugikan Dunia Usaha</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kalangan legislator berjanji bakal mengakomodasi kepentingan dunia usaha dalam penyusunan rancangan undang-undang sumber daya air (RUU SDA). Regulasi ini dijanjikan tidak akan menutup ruang gerak sektor usaha tertentu.		

► SUMBER DAYA AIR

# UU Tidak akan Rugikan Dunia Usaha

Bisnis, JAKARTA — Kalangan legislator berjanji bakal mengakomodasi kepentingan dunia usaha dalam penyusunan rancangan undang-undang sumber daya air (RUU SDA). Regulasi ini dijanjikan tidak akan menutup ruang gerak sektor usaha tertentu.

Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Intan Fitriana Fauzi mengatakan panitia kerja akan fokus pada pokok pengaturan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, pengaturan sumber daya air untuk menjamin hak rakyat atas air menjadi prioritas.

Intan menuturkan, kebutuhan pokok atas air atau kebutuhan domestik menjadi hal utama. Undang-undang akan mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan minimal air untuk masyarakat. Adapun, jumlah kebu-

► **Pengaturan air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi akan dipisahkan, dan hal ini dibuat untuk menjamin kepastian usaha.**

tuhan minimal berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai 60 liter per hari untuk setiap orang.

"Kebutuhan pokok minimal itu harus dipenuhi. Kemudian memang ada skala prioritas [untuk kebutuhan lain] karena selain kebutuhan pokok, kita perlu memikirkan dunia usaha," ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (31/7).

Dia mengungkapkan, saat ini memang ada satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang masih alot dibahas, yakni terkait dengan penggunaan air minum. Dalam pembahasan terakhir, definisi air minum disepakati mencakup sistem penyelenggaraan air minum (SPAM), dan tidak termasuk air minum dalam kemasan (AMDK).

Oleh karena itu, lanjut Intan, undang-undang baru sumber daya air tidak akan mematikan sektor AMDK. Dia menyebut, pengaturan air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi dipisahkan.

Pengaturan ini dibuat untuk menjamin kepastian usaha.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) meminta penyusunan RUU SDA dikaji lebih dalam agar tidak menutup ruang bagi dunia usaha. Pengelolaan air harus dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan untuk seluruh para pemangku kepentingan. NU merupakan salah satu pihak yang melakukan *judicial review* terhadap undang-undang tersebut pada 2015.

Wakil Ketua Umum PBNU Maksud Machfoedz mengatakan RUU SDA yang diinisiasi oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung memberikan kontrol yang berlebihan kepada negara untuk mengelola air dan menutup perkembangan usaha. Hal ini tecermin dari pasal yang mengatur pemberian izin pengelolaan sumber daya air untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa.

#### HARUS DIPISAH

Maksud menambahkan, pengelolaan sumber daya air melalui mekanisme kepemilikan tidak menjamin terwujudnya keadilan. Dia menyebut, pengelolaan air harus dipisahkan berdasarkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Nahdhatul Ulama

memandang kalangan swasta tetap bisa diberikan izin pengelolaan air sepanjang diatur lewat regulasi.

"Dengan memberikan pengusahaan air ke pemerintah lewat BUMN, BUMD, dan Bumdes, ini membuat regulator sekaligus menjadi operator. Yang akan terjadi seperti monopolistik," ujarnya di acara yang sama.

PBNU juga menekankan undang-undang tentang sumber daya air harus menjamin hak atas air warga negara secara adil, baik untuk masyarakat maupun badan usaha. Untuk itu, PBNU menilai pemerintah wajib memiliki neraca sumber daya air di setiap wilayah sehingga bisa mendistribusikan sumber daya air secara adil untuk kebutuhan domestik, pertanian, maupun sektor usaha.

Maksud mengimbau, kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan air untuk industri dalam negeri juga sudah tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dia menekankan, negara perlu berimbang untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, dan dunia usaha atau *people, planet, and profit*.

"Usaha seperti perkebunan skala besar, industri manufaktur, jasa perhotelan, wisata, usaha-usaha milik pesantren dan usaha masyarakat lain-

nya juga membutuhkan jaminan *legal business certainty* dalam mendapatkan sumber daya air," jelas Maksud.

Sebelumnya Ketua Panja RUU SDA, Lasarus mengatakan panja masih akan melakukan konsultasi lebih lanjut terkait penafsiran partisipasi swasta dalam perusahaan SPAM. Dia mengimbau, pihaknya tidak ingin ada uji materi saat RUU ini disahkan.

Lasarus menambahkan, RUU SDA juga tidak membatasi perusahaan AMDK oleh kalangan swasta. Dia menekankan, pengaturan SPAM berbeda dengan AMDK. "AMDK itu pasal 50. SPAM itu pasal 51. Masa swasta enggak boleh [punya usaha di AMDK] dan PHK karyawannya," terangnya.

Penyusunan RUU SDA ditunggu banyak pihak setelah pada 2015, MK membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan UUD 1945.

Pembatalan UU SDA Tahun 2004 membuat MK menghidupkan kembali UU Nomor 11/1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya undang-undang baru. Pembahasan RUU SDA akan dilanjutkan kembali oleh DPR pada 16 Agustus 2019 setelah masa reses usai. ■

Judul	<b>Penyelenggara Sistem Air Minum Belum Optimal</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kalangan pengamat menilai kapasitas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha milik desa perlu ditingkatkan karena selama ini belum optimal dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.		

## Penyelenggara Sistem Air Minum Belum Optimal

Bisnis, JAKARTA — Kalangan pengamat menilai kapasitas badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha milik desa perlu ditingkatkan karena selama ini belum optimal dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.

Direktur Amrta Institute, Nila Ardiani mengatakan bahwa BUMN, BUMD, dan Bumdes punya peran vital dalam menyediakan air minum untuk masyarakat. Terlebih, ketiga entitas itu bakal diberikan mandat pengusahaan SPAM dalam rancangan undang-undang sumber daya air.

Pemberian izin hanya untuk BUMN, BUMD, dan Bumdes disebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU No.7 Tahun 2014 tentang SDA pada 2015 lalu.

“Kami melihat dalam rancangan undang-undang ini, titik beratnya SPAM dikelola pemerintah. Ini cukup baik tapi PDAM di kota-kota besar, misalnya itu layanannya rendah,” jelas Nila dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut Nila, cakupan layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) tidak optimal. Dia mencontohkan Jakarta dan Semarang. Cakupan layanan yang tidak optimal membuat penggunaan air tanah menjadi eksekutif. Secara khusus, kajian Amrta menunjukkan, cakupan layanan PDAM di Jakarta hanya mencapai 35%.

Secara umum, berdasarkan hasil penilaian kinerja PDAM, pada 2018 tercatat 223 PDAM berkinerja sehat, 99 PDAM kurang sehat, dan 52 PDAM sakit. Sebanyak 18 PDAM berhasil meningkatkan kinerja dari kurang sehat menjadi sehat dan dari sakit menjadi kurang sehat.

Nila menuturkan, swasta tetap diperlukan dalam pengusahaan SPAM dan pengaturan ini sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015. Dalam beleid tersebut, swasta bisa berinvestasi pada unit air baku dan unit produksi. Sementara itu, unit distribusi menjadi ranah BUMN atau BUMD.

Pelaksanaan beleid tersebut juga berlangsung pada beberapa proyek SPAM terbaru, antara lain SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Semarang Barat. Ketiga proyek itu merupakan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Sementara itu, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum atau BPPSPAM menargetkan kajian penambahan tugas dan fungsi

organisasi bisa rampung dalam dua bulan mendatang.

Anggota BPPSPAM Unsur Penyelenggara, Henry M. Limbong mengatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah meminta BPPSPAM untuk menyusun kajian terkait tugas dan fungsi tambahan yang perlu diberikan kepada organisasi.

Penambahan ini sejalan dengan rencana Kementerian PUPR memperkuat aspek kelembagaan BPPSPAM agar peningkatan akses air minum bisa dipercepat.

“Kajiannya tuntas dua bulan lagi. Kami belum tahu apa saja [tugas dan fungsi] yang baru. (Rivki Maulana)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengharapkan agar pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan karena hingga akhir Juli 2019, sisa kuota FLPP di seluruh Indonesia tinggal 20.000 unit dan bisa habis pada Agustus tahun ini.		

► **TAMBAHAN KUOTA FLPP**



*Antara/Seno*

**Warga berjalan** di sebuah lokasi perumahan di Jember, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengharapkan agar pemerintah menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan karena hingga akhir Juli 2019, sisa kuota FLPP di seluruh Indonesia tinggal 20.000 unit dan bisa habis pada Agustus tahun ini.

Judul	<b>PEMBIAYAAN PERUMAHAN: Syarat BP2BT sederhanakan</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menyediakan beragam cara subsidi pembiayaan perumahan, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan terbaru Bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis Tabungan (BP2BT).		

► PEMBIAYAAN PERUMAHAN

## Syarat BP2BT Disederhanakan

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyediakan beragam cara subsidi pembiayaan perumahan, mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan terbaru Bantuan Pembiayaan Perumahan berbasis Tabungan (BP2BT).

Lantaran kian menipisnya kuota FLPP yang selama ini menjadi andalan pemerintah dan pengembang rumah subsidi, PUPR menyebut akan mengalihkan pembiayaan melalui SSB dan BP2BT.

Namun, hingga saat ini program SSB dan BP2BT itu belum berjalan optimal, terlebih BP2BT dianggap pengembang menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah aturan terkait kewajiban adanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), lantaran belum semua pemerintah daerah menerbitkan sertifikat

tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heri Djulipoerwanto mengatakan bahwa sampai saat ini program SSB sudah terealisasi. Adapun, permintaan asosiasi pengembang untuk menambah kuota FLPP masih dalam pengkajian oleh pemerintah.

"Dengan kuota yang masih ada, pengembang diharapkan tetap mengikuti teknis, persyaratan, dan mempertahankan kualitas bangunan," ungkapnya kepada *Bisnis*, Rabu (31/7).

Selain itu, Eko menyebutkan bahwa saat ini, pelaksanaan BP2BT masih terkendala oleh kewajiban SLF, untuk itu PUPR segera melakukan sosialisasi melalui surat edaran untuk meringankan aturan kewajiban SLF di BP2BT.

Adapun, keringanan aturan BP2BT itu rencananya akan berupa pelonggaran standar

penilaian SLF dengan mencari substitusi SLF, terutama bagi daerah yang belum melembagakan SLF.

"Untuk pilhan substitusinya, nanti ke depan akan kembali diinfokan, tapi yang diharapkan pengembang agar disamakan dengan FLPP dan SSB, yaitu cukup dengan verifikasi dari tenaga ahli atau Pra-SLF," jelasnya.

Hingga kini, Eko menyebutkan, pengkajian soal aturan BP2BT masih dibahas oleh internal Kementerian PUPR. Adapun, PUPR juga sudah melakukan sosialisasi secara tidak resmi kepada pengembang terkait dengan kemungkinan pelonggaran aturan SLF pada BP2BT.

Rencana Kementerian PUPR untuk meringankan aturan tersebut sangat dinantikan oleh pengembang agar bisa ikut menggunakan skema pembiayaan tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengem-

bang dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan bahwa seperti proyeknya yang di Serang belum bisa menerapkan skema BP2BT karena Pemdanya tidak menerbitkan SLF.

"Jadi kalau ada perubahan aturan SLF untuk BP2BT itu kami sangat berharap bisa segera terlaksana. Jadi mudah-mudahan cukup dengan verifikasi dari tenaga ahli, sama dengan syarat SSB [Subsidi Selisih Bunga] dan FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan]," katanya kepada *Bisnis*, belum lama ini.

Endang menjelaskan, untuk verifikasi tenaga ahli sudah ada dalam bentuk form bersama dengan form SLF, tapi hanya sampai di tengah halaman.

Untuk FLPP dan SSB itu cukup mengisi sampai verifikasi di bagian tengah, sedangkan BP2BT harus sampai habis.

(Mutlari Nabila)

Judul	Selatan Pulau Jawa Rawan Tsunami	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 16)		
Resume	Empat hari lalu media sosial diramaikan adanya isu tsunami dan gempa besar yang melanda wilayah selatan Pulau Jawa. Isu itu tentu mencemaskan jika membayangkan dampak yang ditimbulkannya.		

## Selatan Pulau Jawa Rawan Tsunami

EMPAT hari lalu media sosial diramaikan adanya isu tsunami dan gempa besar yang melanda wilayah selatan Pulau Jawa. Isu itu tentu mencemaskan jika membayangkan dampak yang ditimbulkannya. Namun, sebagai hal biasa karena banyak ahli telah memprediksikan dan membuktikan dari kajian sejarah bahwa wilayah selatan Jawa memang rawan terhadap tsunami.

Satu lagi, sebuah hasil riset yang dilakukan para ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan kesimpulan yang sama. Penelitian yang dilakukan

Eko Yulianto lewat uji karbon, ditemukan deposit tsunami di pesisir Kulon Progo, Yogyakarta yang berusia 300 tahun.

Dari situ patut diduga tsunami di daerah tersebut pernah terjadi pada 1699. Deposit lebih tua juga ditemukan berusia 1698 tahun, 2785 tahun, dan 3589 tahun. Deposit dengan usia lebih kurang sama, ditemukan di Lebak, Banten, hingga Cilacap, Jawa Tengah.

Sejarah lain juga mencatat tsunami selatan Jawa pernah terjadi pada 1840, 1859, 1921, 1994, dan 2006.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat

### Sejarah lain juga mencatat tsunami selatan Jawa pernah terjadi pada 1840, 1859, 1921, 1994, dan 2006.

Triyono pun mengamini hasil riset LIPI itu. Bahkan, temuan tersebut akan dijadikan dasar untuk penguatan kesiapsiagaan masyarakat di selatan Jawa.

Dari survei masyarakat di

selatan Pulau Jawa kalah siap dalam menanggulangi ancaman tsunami jika dibandingkan dengan warga di wilayah Sumatra Barat yang diprediksi bisa dilanda gempa besar segmen *megathrust* Mentawai.

Tak heran di sana sudah siap sarana dan prasarana, seperti selter-selter tsunami di Sumbang dan edukasi masyarakat berjalan baik.

Berdasarkan kajian risiko bencana di Indonesia, Badan Nasional Pengurangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 584 desa di selatan Pulau Jawa yang masuk dalam kategori wilayah kelas rawan, sedang,

dan tinggi tsunami. Diperkirakan ada 600 ribu warga yang bermukim di sana.

Di sinilah diperlukan kejujuran dari masyarakat dan mau mengakui serta menerima kenyataan bahwa wilayah Indonesia, khususnya wilayah selatan Pulau Jawa rawan gempa dan tsunami.

Keberadaan zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menghunjam ke bawah lempeng Eurasia merupakan generator gempa kuat sehingga wajar jika wilayah selatan Jawa merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami.

Ini juga bukti bahwa informasi potensi bahaya gempa dan tsunami yang disampaikan para ahli ialah benar, bukan berita bohong. (Ind/H-1)

Judul	<b>Kalimantan Timur Sodorkan Dua Lokasi Calon Ibu Kota</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 5)		
Resume	PROVINSI Kalimantan Timur menyodorkan dua lokasi sebagai calon ibu kota negara, yakni kawasan Tahura Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kelurahan Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara.		

# Kalimantan Timur Sodorkan Dua Lokasi Calon Ibu Kota

PROVINSI Kalimantan Timur menyodorkan dua lokasi sebagai calon ibu kota negara, yakni kawasan Tahura Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kelurahan Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Jika dibandingkan dengan lokasi lainnya di Kalimantan, Kaltim memiliki potensi besar, baik dari sisi geografis maupun sumber daya yang dimiliki, di samping kelengkapan infrastruktur yang telah tersedia,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi.

Dua lokasi yang dipersiapkan menjadi lokasi ibu kota negara berdekatan dengan Kota Balikpapan yang infrastrukturnya lengkap dan ibu kota provinsi, Samarinda. “Kita tentunya tidak akan melakukan upaya-upaya lobi agar dipilih menjadi lokasi ibu kota negara karena semuanya melalui perhitungan matang dan menjadi hak pemerintah pusat.”

Presiden Joko Widodo meng-

## Dua kawasan itu ialah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelurahan Sotek di Penajam Paser Utara.

aku tidak ingin tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru dan masih sesuai rencana akan disampaikannya pada Agustus mendatang.

“Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantan yang mana, nanti kita sampaikan Agustus,” kata Presiden di kawasan wisata The Kaldera Toba, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Hingga saat ini, kata Presiden, pemerintah masih beru-

paya menyelesaikan kajian pendukung terkait dengan hal tersebut.

“Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet,” ujar Presiden.

Wapres Jusuf Kalla membenarkan jika pemindahan ibu kota masih dalam tahap kajian sehingga belum bisa mendapatkan alokasi dana dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam waktu dekat.

“Jadi, (tahapannya) memilih, menentukan, baru perencanaan. Ini masih tahap kajian. APBN itu kalau jelas perencanaannya, kalau belum ada perencanaannya, ya, bagaimana mau masuk APBN,” ujar Wapres. (Mal/Dro/Ant/P-1)

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 5)		
Resume	Daerah yang menjadi bakal calon ibu kota negara itu telah ditinjau Presiden Joko Widodo pada Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan ibu kota negara.		



ANTARA /HARDZ MUBARAK A

**DAERAH BAKAL CALON IBU KOTA NEGARA:** Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7). Daerah yang menjadi bakal calon ibu kota negara itu telah ditinjau Presiden Joko Widodo pada Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan ibu kota negara.

Judul	<b>Danau Toba: Jokowi Promosi Besar-besaran</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 1)		
Resume	Mulai tahun depan, pemerintah akan mempromosikan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata kelas dunia secara besar-besaran. Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu di Tano Ponggol, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara, kemarin.		

## DANAU TOBA

# Jokowi Promosi Besar-besaran

MULAI tahun depan, pemerintah akan mempromosikan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata kelas dunia secara besar-besaran. Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu di Tano Ponggol, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara, kemarin.

“Setelah semua selesai, akan kita promosikan dan *marketing* besar-besaran Danau Toba,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi berada di Sumatra Utara selama tiga hari untuk mengunjungi beberapa titik di kawasan Danau Toba, baik yang berada di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba Samosir, maupun Samosir.

“Meskipun sekarang sudah mulai, besar-besarnya tahun depan setelah produknya ini betul-betul selesai. Produknya tadi desa adat, desa ulos, pasar suvenir, jalannya sudah siap, dermaganya sudah siap, termasuk ini terusan Tano Ponggol,” lanjut Presiden.

Dalam mempersiapkan Danau Toba sebagai destinasi wisata, pemerintah akan memperhatikan lingkungan hidup dengan menindak tegas bila ada perusahaan pengelola hutan terbukti merusak lingkungan.

Upaya menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas nasional tidak hanya didukung infrastruktur, tetapi juga SDM. Jokowi mengatakan sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) akan berubah menjadi SMK pariwisata.

“SMK di sini beberapa akan kita *switch* menjadi SMK pariwisata. Enggak bisa hanya produknya, tetapi SDM-nya tidak atau hanya SDM dan produknya, tetapi lingkungan atau hutan tidak dikembalikan lagi, itu enggak bisa,” ujar Jokowi.

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tengah menyelesaikan pembangunan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Prapat untuk mempermudah akses dari Medan ke Danau Toba.

“Jalan yang semakin baik menunjang perekonomian di kawasan wisata,” kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Selain mempercepat waktu tempuh ke Danau Toba, tol ini juga diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara. (Nav/Mal/AP/JH/X-3)

Judul	<b>Warga Yakin Ibu Kota Pindah ke Kalteng</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 2)		
Resume	Sejumlah warga Kalimantan Tengah meyakini, ibukota negara Republik Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke daerahnya.		

## Warga Yakin Ibu Kota Pindah ke Kalteng

**PALANGKARAYA, KOMPAS** — Sejumlah warga Kalimantan Tengah meyakini, ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke daerahnya. Selain memicu kenaikan harga tanah, keyakinan itu juga membuat warga di sejumlah daerah di Kalteng aktif menandai lahan miliknya.

Padahal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro baru menyatakan, ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun, belum disebutkan ibu kota akan berada di daerah mana di Kalimantan.

"Kalau pulaunya sudah pasti Kalimantan. Tidak ada yang pernah mengatakan sudah pasti Palangkaraya (ibu kota Kalteng). Pokoknya Kalimantan, belum ada embel-embel Utara, Tengah, Barat, Selatan, atau Timur," kata Bambang Brodjonegoro di Jember, Jawa Timur, Rabu (31/7/2019).

Bambang menegaskan, pemerintah sudah merampungkan kajian terkait pemindahan

ibu kota. Pemerintah akan secara resmi mengumumkan hal ini dalam waktu dekat. "Targetnya tahun ini akan diumumkan langsung oleh Presiden. Tahun 2024 mulai pindah," ujarnya.

Bappenas menetapkan tujuh kriteria untuk lokasi ibu kota negara yang baru. Kriteria itu antara lain tempat itu dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi infrastruktur, berada di tengah kepulauan Indonesia, tersedia lahan yang cukup yang dikuasai pemerintah, bebas bencana, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan. Syarat lain yaitu tersedia air bersih yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.

Sementara dari aspek sosial, penduduk setempat memiliki budaya terbuka kepada pendatang dan potensi konflik sosial rendah.

### Harga tanah

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa wilayah

di Kalteng pada awal Mei lalu membuat sebagian warga Kalteng semakin percaya ibu kota akan dipindahkan ke daerahnya. Ini membuat harga tanah pun meningkat di setiap lokasi yang diusulkan, yakni di Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas.

Camat Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Sugiarto menuturkan, kabar itu membuat banyak warganya mulai menjual tanah.

Pada saat yang sama, sebagian warga juga mulai membersihkan lahannya yang ada di daerah itu. Nikolas Itak (45), warga Kota Palangkaraya, misalnya, membayar dua orang untuk membersihkan lahannya. Lahan itu kemudian disiram cairan kimia agar lebih kering dan lebih mudah dibersihkan.

Hal serupa terjadi di beberapa lahan tidur di Jalan Mahir-Mahar, lingkaran Kota Palangkaraya, dan Jalan Tjilik Riwut menuju Kabupaten Pulang Pisau. Lahan-lahan itu terlihat lebih kuning dan ke-

ring, bahkan mati. Anehnya, di sekeliling lahan itu, rumput-rumput masih hijau dan hidup.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri mengungkapkan, hal itu terjadi karena warga ingin menandai lahannya. Pasalnya, sejak ada wacana perpindahan ibu kota negara, klaim tanah mulai tinggi.

Namun, cara menandai lahan seperti itu berpotensi memicu kebakaran. Hal itu didukung penyelidikan kepolisian terhadap kasus pembakaran lahan. Selama Juli lalu, pihak kepolisian menyelidiki delapan kasus pembakaran, dan dua kasus di tahap penyidikan. Total ada dua tersangka yang kini masih diperiksa.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalteng Hendra Rochmawan. Ia mengungkapkan, empat orang telah ditangkap polisi dari delapan kasus kebakaran lahan.

(IDO/GER)

Judul	<b>Pembangunan Kawasan Danau Toba Ditarget Selesai 2020</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur, destinasi, sumber daya manusia, dan pemulihan lingkungan hidup di kawasan Danau Toba Sumatera Utara, hingga akhir 2020.		

## Pembangunan Kawasan Danau Toba Ditarget Selesai 2020

**SAMOSIR, KOMPAS** — Presiden Joko Widodo memberi tenggat waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur, destinasi, sumber daya manusia, dan pemulihan lingkungan hidup di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, hingga akhir 2020.

"Tiga hari ini kami sudah kunjungi hampir semua titik di kawasan Danau Toba, baik yang di Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Simalungun, Toba Samosir, maupun Samosir. Nanti dilihat perubahannya akhir tahun depan," kata Presiden di Samosir, Rabu (31/7/2019).

Dalam kunjungan kerja sejak Senin (29/7), Presiden menda-tangi, antara lain, Geosite Sipinsur, Taman Wisata Salib Kasih, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Ajibata, dan Kawasan Otorita Danau Toba. Presiden juga menyeberang ke Pulau Samosir menggunakan Kapal Motor Penyeberangan Ihan Batak.

Ikut mendampingi Presiden, Nyonya Iriana Joko Widodo, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata



**Presiden Joko Widodo** menaiki traktor saat kunjungan kerja di Desa Parsinggungan II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rabu (31/7/2019). Presiden melihat dari dekat potensi pertanian dan peternakan sapi di sana.

Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Di Samosir, Presiden mengunjungi pembangunan Jalan Lingkar Samosir, pele-

baran Terusan Tano Ponggol, dan Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba. Pemerintah mengucurkan Rp 3,5 triliun untuk mendukung pembangunan pariwisata Danau Toba.

Sejumlah proyek yang dibangun di sana meliputi pem-

angunan 12 pelabuhan, penyediaan lima kapal, pelebaran Jalan Lingkar Samosir, pelebaran alur Tano Ponggol, dan pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Samosir. Kemudian, penataan kawasan Parapat, pembangunan *waterfront city* di

Samosir, pengembangan Kawasan Otorita Danau Toba seluas 386 hektar, dan pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.

"Setelah itu selesai akan dipromosikan besar-besaran Danau Toba," kata Jokowi.

Pembangunan kawasan Danau Toba, menurut Presiden, juga dibarengi pemulihan lingkungan. Pemerintah sedang mengkaji dampak keramba jaring apung dan perusahaan hutan industri yang mengancam danau. Presiden menekankan akan menutup perusahaan jika terbukti mencemari danau.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 2,4 triliun untuk pembangunan proyek infrastruktur di kawasan Danau Toba pada 2020. Anggaran itu meningkat dibanding tahun 2019, yakni Rp 821 miliar.

Sementara Arief Yahya mengatakan, pembangunan pariwisata Danau Toba berbasis *geopark* atau taman bumi. Geopark Kaldera Toba kini sedang menjalani penilaian untuk menjadi anggota UNESCO Global Geopark (UGG). (NSA)

Judul	<b>Waduk Rambutan Jadi Proyek Percontohan Naturalisasi</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman Metro)		
Resume	Pemerintah DKI Jakarta memastikan waduk Rambutan 1 dan 2, Jakarta Timur, sebagai proyek percontohan program naturalisasi waduk di Ibukota.		

## Waduk Rambutan Jadi Proyek Percontohan Naturalisasi

Tepi waduk akan ditata tanpa beton serta dilengkapi ruang terbuka.

EDISI, 1 AGUSTUS 2019



Waduk Kampung Rambutan 1 di Jakarta Timur, 14 Januari lalu.

**JAKARTA** – Pemerintah DKI Jakarta memastikan Waduk Rambutan 1 dan 2, Jakarta Timur, sebagai proyek percontohan program naturalisasi waduk di Ibu Kota. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan pengerukan tanah untuk Waduk Rambutan 1 dan 2 telah rampung. "Tinggal merapikan beberapa bagian," kata Juaini kepada Tempo, Selasa lalu.

Selanjutnya, Juaini menerangkan, pembangunan dua waduk di dekat Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, itu akan menerapkan konsep naturalisasi, yang menjadi bagian dari upaya penanggulangan banjir. "Rencananya (konstruksi) dikerjakan Agustus mendatang dan rampung akhir 2019," ujar Juaini.

Waduk Rambutan 1 dan 2 terhubung langsung dengan Kali Cipinang. Setelah berfungsi, kata Juaini, kedua waduk diharapkan bisa meminimalkan potensi banjir di wilayah Pinang Ranti, Makasar, Halim Perdanakusuma, dan Kramat Jati.

Pembangunan Waduk Rambutan 1 dan 2 yang dimulai pada 2015 sempat mangkrak. Musababnya, Dinas Sumber Daya Air DKI sempat kesulitan membuang tanah merah hasil pengerukan lahan.

Pada Februari lalu, Tempo mendatangi lokasi pembangunan kedua waduk tersebut. Kala itu, alat-alat berat hanya terparkir dan tidak bekerja di sana. Warga sekitar juga mengeluhkan genangan air di dalam galian yang malah menjadi sarang nyamuk.

Kondisinya jauh berbeda ketika Tempo kembali mendatangi tempat yang sama Jumat lalu. Kali ini, mesin ekskavator terus menderu mengeruk dan merapikan bagian pinggir waduk. Area waduk sudah terlihat bentuknya. Tidak tampak lagi ilalang dan rumput liar yang lebat di sana. "Sebulan terakhir sudah mulai aktif dikerjakan lagi pengerukannya," ucap Solihin, warga sekitar waduk.

Solihin berharap pembangunan kedua waduk itu segera selesai. Apalagi, dia pun mendengar akan ada ruang terbuka untuk publik di sekitar waduk. "Lumayan, bisa jadi pelaris dagangan kalau di sini ramai," ucap pria 46 tahun ini.

### BERITA TERKAIT

**Anies Minta Kendaraan Berat di Jalan Tol Luar Dibatasi**

**Waduk Rambutan Jadi Proyek Percontohan Naturalisasi**

**DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Penataan Sungai**

Judul	<b>DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Penataan Sungai</b>	Tanggal	Kamis, 1 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman Metro)		
Resume	Pemerintah DKI Jakarta akan menggenjot lagi pembebasan lahan untuk penataan sejumlah sungai di Ibu kota.		

## DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Penataan Sungai

Balai Besar siap melaksanakan naturalisasi sungai bila luas lahannya memadai.

EDISI, 1 AGUSTUS 2019



Proyek pembuatan waduk di kawasan Bungur, Kampung Rambutan, Jakarta Timur.

**JAKARTA** – Pemerintah DKI Jakarta akan menggenjot lagi pembebasan lahan untuk penataan sejumlah sungai di Ibu Kota. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan pengerukan sungai yang sempat berhenti selama dua tahun terakhir pun segera dimulai lagi. Tujuannya, untuk mengendalikan banjir saat musim hujan nanti.

"Berdasarkan kegiatan strategis daerah, naturalisasi akan menyentuh waduk terlebih dulu. Untuk sungai masih pendataan," ujar Juaini, Selasa lalu.

Sembari menggarap proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, menurut Juaini, Dinas Sumber Daya Air juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelumnya, Juaini mengatakan, program pelebaran dan penataan (normalisasi) Sungai Ciliwung sempat terhenti karena terganjal masalah pembebasan lahan. Hingga 2017, dari target normalisasi sungai sepanjang 33 kilometer, pengerjaan baru terealisasi 16 kilometer.

Pengerjaan normalisasi Ciliwung merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dan BBWSCC. Adapun pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai yang hendak dinormalisasi merupakan tugas pemerintah DKI. Karena pembebasan lahan tersendat, pemerintah pusat tak mengalokasikan dana untuk normalisasi Sungai Ciliwung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Tahun ini, menurut Juaini, pemerintah DKI akan membebaskan lahan di sekitar sungai dan waduk yang akan ditata. Dana pengadaan lahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dialokasikan untuk penataan sungai dan saluran air sebesar Rp 500 miliar. Adapun dana pengadaan lahan untuk penataan waduk, situ, dan embung sebesar Rp 350 miliar. Targetnya, akhir tahun ini, pembebasan lahan itu rampung. "Karena kemarin sempat dua kali ganti plt (pelaksana tugas kepala dinas), jadi terhambat," ujar dia.

### BERITA TERKAIT

**Anies Minta Kendaraan Berat di Jalan Tol Lingkar Luar Dibatasi**

**Waduk Rambutan Jadi Proyek Percontohan Naturalisasi**

**DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Penataan Sungai**

## Proyek Perdana Naturalisasi

PEMERINTAH DKI Jakarta telah membangun sejumlah waduk untuk mengendalikan banjir di Ibu Kota. Waduk itu di antaranya adalah Waduk Rambutan 1 dan 2 yang berfungsi mengantisipasi luapan Kali Cipinang. Gubernur Anies Baswedan telah menetapkan waduk tersebut sebagai proyek rintisan program naturalisasi.

### Waduk Rambutan

- » Lokasi: RW 06 dan RW 04, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
- » Luas: 15 hektare
- » Kedalaman: 6 meter
- » Pembangunan fisik: 75 persen
- » Pemenang tender proyek naturalisasi: PT Jhuda Citraguna
- » Pagu anggaran: Rp 20 miliar
- » Mulai pengerjaan konstruksi: Agustus 2019
- » Target rampung: akhir 2019

### Rencana desain konstruksi:

- » Finishing waduk tanpa beton
- » Membangun fasilitas taman
- » Membangun fasilitas jogging track



Tak hanya terhambat masalah pembebasan lahan, program penataan sungai di Ibu Kota juga tersendat karena perbedaan konsep yang diusung pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Sejak masa kampanye pemilihan gubernur pada 2017, Anies Baswedan mengusulkan konsep naturalisasi alias penataan sungai secara alamiah. Berbeda dengan konsep normalisasi yang mengandalkan penurapan pinggir sungai dengan beton, naturalisasi versi Anies mengusulkan pembuatan tanggul alamiah dari batu atau tanah.

Kementerian PUPR sempat menyatakan kebingungan atas gagasan Anies tersebut. Dalam pandangan Kementerian PUPR, program naturalisasi memerlukan tanah yang lebih luas ketimbang normalisasi. Padahal, lahan di pinggiran sungai di Ibu Kota umumnya sangat sempit karena sudah dipenuhi bangunan.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayat mengatakan saat ini pemerintah pusat tak mempermasalahkan lagi konsep mana yang akan dipilih pemerintah DKI. Sebab, tujuan normalisasi ataupun naturalisasi sama-sama menyiapkan kapasitas sungai agar bisa menampung debit banjir yang datang dari hulu. "Dua-duanya visinya sama," kata Bambang.

Bila pemerintah DKI konsisten mengusung metode naturalisasi, menurut Bambang, konsekuensinya lahan yang harus dibebaskan lebih luas lagi. Pemerintah DKI harus menyediakan lahan selebar 80–90 meter dari bibir sungai. Jika lebar lahan itu terpenuhi, kata Bambang, BBWSCC bisa saja melakukan naturalisasi seperti yang dikehendaki Anies.